

Laporan Kinerja
KPKNL Samarinda

2023



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda Tahun 2023 dengan sistematika yang ditentukan.

Kami harapkan LAKIN ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Samarinda. Kepada semua pegawai yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja KPKNL Samarinda, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Samarinda, 2 Februari 2024

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Samarinda

Ditandatangani secara elektronik
Bagus Kurniawan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	1
1. Tugas dan Fungsi.....	1
2. Struktur Organisasi.....	2
B. PERAN STRATEGIS INSTANSI	3
1. Pengelolaan Kekayaan Negara.....	4
2. Pelayanan Penilaian	4
3. Pengurusan Piutang Negara	5
4. Pelayanan Lelang.....	5
5. Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
B. PERJANJIAN KINERJA	11
C. PENGUKURAN KINERJA.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
1. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023.....	22
2. Kinerja KPKNL Samarinda Tahun 2019-2023	26
3. Upaya dalam Rangka Pencapaian Kinerja	28
4. Evaluasi dan Analisis Keberhasilan Kinerja.....	30
5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
5. Program/Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja	34
7. Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko	36
8. Rencana Aksi	36
B. REALISASI ANGGARAN	37
BAB IV PENUTUP	38
A. SIMPULAN.....	38
B. HAMBATAN DAN HARAPAN.....	39
LAMPIRAN	41

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi

Dalam rangka pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), salah satu hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Indikator peningkatan kinerja instansi pemerintah dapat ditilik melalui ukuran pengelolaan keuangan yang sehat dan modern, pengukuran kinerja dengan indikator capaian, dan keterkaitan kegiatan dengan program instansi.

Dinamika organisasi merupakan salah satu faktor yang tak terelakkan dalam perkembangan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Seiring perkembangan teknologi serta digitalisasi, penyesuaian peta proses bisnis Kementerian Keuangan, dan arah kebijakan kelembagaan secara nasional, Kementerian Keuangan khususnya DJKN terus melakukan reformasi birokrasi dan perbaikan kelembagaan. Penyesuaian organisasi pemerintah sesuai dengan peta proses bisnis tersebut dilakukan agar instansi DJKN mampu terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dengan berdasarkan kebutuhan pelayanan di masa depan.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;

- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

2. Struktur Organisasi

Guna melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan sebelumnya, telah dilakukan penataan organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Adapun struktur organisasi KPKNL terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi KPKNL dengan 1 (satu) subbagian, 4 (empat) seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional masing-masing di bawah Kepala Kantor dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi KPKNL

KPKNL Samarinda berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 6, Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang kekayaan negara,

penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Samarinda dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan didukung oleh 1 (satu) subbagian, 4 (empat) seksi, beserta Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing bidang kerja yang ditetapkan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh KPKNL Samarinda dalam pelaksanaan kinerja untuk mencapai tujuan organisasinya sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang yang dirinci sesuai jabatan dan kedudukan sebagai berikut

- i. Kepala Kantor : 1 (satu) orang
- ii. Subbagian Umum : 6 (enam) orang
- iii. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara : 5 (lima) orang
- iv. Seksi Piutang Negara : 3 (tiga) orang
- v. Seksi Hukum dan Informasi : 4 (empat) orang
- vi. Seksi Kepatuhan Internal : 3 (tiga) orang
- vii. Jabatan Fungsional Pelelang : 4 (empat) orang
- viii. Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah : 4 (empat) orang



Gambar 2. Struktur Organisasi KPKNL Samarinda

B. PERAN STRATEGIS INSTANSI

Setiap pelayanan pada KPKNL Samarinda merupakan bentuk implementasi peran strategis DJKN guna pencapaian tujuan pada tiap bidang kerja. Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL Samarinda memiliki peran strategis dalam melaksanakan implementasi kebijakan terkait bidang-bidang tersebut. Tugas dan fungsi

tersebut merupakan sarana organisasi dalam menjalankan tugas yang diemban demi mewujudkan tujuan organisasi, sesuai dengan kerangka visi dan langkah misi organisasi DJKN. Lebih lanjut, tugas dan fungsi KPKNL Samarinda dijabarkan dalam peran strategis sebagai berikut.

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai instansi vertikal DJKN yang berperan dalam pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Samarinda memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, penatausahaan kekayaan negara. Dalam kaitannya dengan fungsi DJKN sebagai *asset manager*, KPKNL Samarinda mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, serta penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan. KPKNL Samarinda berperan membantu satuan kerja instansi vertikal kementerian/lembaga untuk menciptakan penatausahaan barang milik negara (BMN) yang tertib hukum, tertib fisik dan tertib administrasi.

Untuk menuju optimalisasi tersebut KPKNL Samarinda berperan aktif dalam penertiban Barang Milik Negara (BMN) pada tiap satuan kerja (satker) dalam wilayah kerja dengan tujuan utama sebagai berikut:

- a. Melakukan pemutakhiran pembukuan BMN,
- b. Mewujudkan penatausahaan BMN di seluruh satuan kerja (satker) Pemerintah Pusat pada wilayah kerja KPKNL Samarinda,
- c. Melakukan tindak lanjut penatausahaan dan pengelolaan BMN yang tertib dan optimal.

Saat ini, peran KPKNL Samarinda menjadi semakin strategis dikarenakan sebagian wilayah kerja KPKNL Samarinda direncanakan akan menjadi calon Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPKNL Samarinda dalam pengelolaan kekayaan negara. Untuk menjawab tantangan tersebut, KPKNL Samarinda terus berupaya meningkatkan kinerja yang baik khususnya dalam hal pengelolaan kekayaan negara agar dapat menghasilkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara yang optimal.

2. Pelayanan Penilaian

Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi. Penilaian dilakukan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Kegiatan penilaian dimaksudkan

untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan BMN lain yang berada di lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi di bidang penilaian. Hasil penilaian kekayaan negara tersebut antara lain digunakan untuk penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan, pemindahtanganan BMN, dan pengurusan piutang negara (penilaian barang jaminan). Dengan demikian, hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien.

3. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab lain yang sah. Akan tetapi, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, piutang macet yang berasal dari BUMN tidak diserahkan lagi pengurusan kepada PUPN melalui KPKNL, sehingga fokus pengurusan dilakukan terhadap Piutang Negara yang telah diserahkan dan Piutang Negara yang berasal dari instansi pemerintah pusat maupun daerah.

4. Pelayanan Lelang

Pelayanan Lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Secara istilah, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului adanya Pengumuman Lelang. Selain itu, lelang merupakan bentuk pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan yang telah dilekatkan hak tanggungan dan eksekusi terhadap putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan mengedepankan asas keterbukaan, asas persaingan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas. KPKNL Samarinda dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat selalu mengutamakan pelaksanaan lelang yang transparan, akuntabel, kompetitif, dan efisien. Diharapkan dengan semakin berkembangnya teknologi, khususnya terkait pengembangan *e-auction* dan *platform marketplace auction*, lelang dapat menjadi sarana transaksi pilihan masyarakat serta dapat berperan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.



5. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam melaksanakan pengurusan piutang negara, KPKNL Samarinda memperoleh hasil berupa Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad). Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang memperoleh hasil berupa Bea Lelang termasuk Biaya Administrasi Balai Lelang yang selanjutnya disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan senantiasa memberikan pelayanan yang prima, KPKNL Samarinda diharapkan dapat menghasilkan PNBP dan merealisasikan potensi PNBP dari hasil pengurusan piutang negara, pelayanan lelang, dan pengelolaan kekayaan negara. Sepanjang tahun 2023, KPKNL Samarinda telah berperan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana uraian tersebut sesuai amanat peraturan perundang-undangan dengan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada secara optimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Selain berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diharapkan mampu menjawab tantangan di bidang perekonomian khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara. Salah satu kondisi yang menjadi pertimbangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 adalah pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia pada awal tahun 2020 yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia.

DJKN berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam

menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN yaitu “*Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*” Pengertian profesional dalam visi tersebut bermakna bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Pengelola Kekayaan Negara diharapkan dapat memiliki karakter kontributif, instrumental, otoritatif, berkelanjutan, dan adaptif. Penjabaran lebih lanjut karakter tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Kontributif** berarti bahwa hasil pengelolaan kekayaan negara dapat mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN serta andil dalam penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional;
- b. **Instrumental** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara memiliki peran penting dalam keuangan negara melalui peran konsultatif, implementatif, dan pengawasan efektif dalam manajemen aset dan investasi;
- c. **Otoritatif** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara DJKN menjadi acuan yang paling berpengaruh dalam tataran teoritis maupun praktis yang dapat diadopsi dan direplikasi oleh manajer aset lain di level nasional dan internasional;
- d. **Berkelanjutan** diwujudkan melalui peningkatan tata kelola dan nilai tambah aset dan investasi pemerintah yang mengurangi eksposur APBN karena adanya kemandirian finansial dan risiko yang minimum; dan
- e. **Adaptif** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara mampu mengambil peluang dan responsif terhadap perkembangan teknologi, perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dinamika kontemporer lainnya.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan

5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu ditetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2020-2024 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien; dan
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DJKN telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi; dan
 - d. Komunikasi publik yang efektif.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh DJKN. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi DJKN yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial

Kondisi yang ingin dicapai dalam Arah Kebijakan ini adalah menjadi

- a. pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal, serta
- b. pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.

Adapun Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal adalah sebagai berikut.

- a. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara seluruh Kementerian/Lembaga
- b. Optimalisasi pengelolaan piutang negara
- c. Penguatan regulasi di bidang kekayaan negara melalui penyusunan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara (Omnibus Law)
- d. Penyederhanaan regulasi di bidang Pengelolaan BMN dengan tetap menjaga akuntabilitas

Adapun Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya adalah melalui

- a. peningkatan kapasitas SDM, perbaikan bisnis proses dan perangkat analisis Investasi Pemerintah, dan
- b. *cross function* unit vertikal DJKN/Kementerian Keuangan (DJP/DJBC/DJPB) dan SMV Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan program kerja SMV.

2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan ini adalah pengelolaan lelang yang optimal. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai pengelolaan lelang yang optimal adalah dengan

- a. pelaksanaan *e-Auction* yang mengakomodasi prinsip-prinsip *ecommerce* baik secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan *startup* di bidang *marketplace*, dan
- b. pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang dengan kemampuan teknologi informasi yang andal dan modern.

3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan arah kebijakan ini adalah penilaian yang berkualitas. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut adalah

- a. pengembangan sistem informasi penilaian yang terintegrasi dengan instansi terkait secara nasional yang dapat digunakan dalam pengelolaan kekayaan negara, serta
- b. peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.

4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan ini adalah:

- a. organisasi dan SDM yang optimal,

- b. sistem informasi yang andal dan terintegrasi,
- c. pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, serta
- d. komunikasi publik yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai organisasi dan SDM yang optimal adalah melalui:

- a. restrukturisasi dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja DJKN;
- b. penguatan penyedia tenaga fungsional dan profesional bersertifikasi; dan
- c. pembentukan unit pengelola BMN Hulu Migas.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah

- a. transformasi digital manajemen aset dengan mewujudkan *IT-Based Service* Kekayaan Negara,
- b. pengembangan pusat data yang integratif dan andal untuk berbagai kepentingan, dan
- c. peningkatan kapabilitas tata kelola TIK DJKN.

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, DJKN melaksanakan program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang. Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, DJKN harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien baik di tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat Kantor Vertikal. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dengan adanya penataan organisasi sebagai salah satu pilar dalam reformasi birokrasi, diharapkan bahwa pencapaian target penerimaan negara dan pelayanan kepada masyarakat akan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal. Untuk mendukung hal tersebut, setiap kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diinstruksikan untuk menetapkan indikator dan target kinerja yang menjelaskan keberhasilan pencapaian kinerja baik berupa hasil (*output*) maupun manfaat (*outcome*). Penetapan indikator dan target kinerja tersebut dikenal sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Perencanaan kinerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan prima dengan tetap menjaga integritas dan mempersembahkan kinerja terbaik di lingkungan instansi tersebut berada. Dalam mengemban tugas dan fungsi, KPKNL Samarinda mempunyai **visi dan misi** yang sejalan dengan visi dan misi Kantor Pusat DJKN dan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara yang merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran DJKN yaitu,



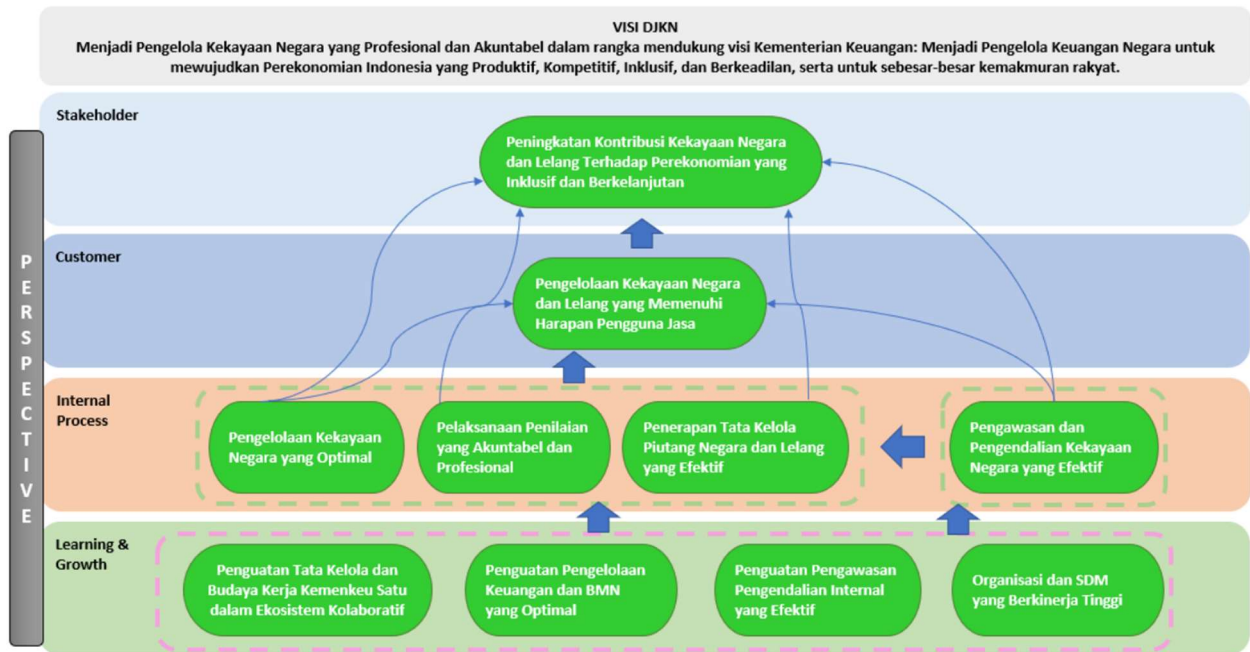
”Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, KPKNL Samarinda menuangkan perencanaan kinerja tahun 2023 dalam sebuah Kontrak Kinerja KPKNL Samarinda Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dan Kepala KPKNL Samarinda sebagai berikut.

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala KPKNL Samarinda, akan:

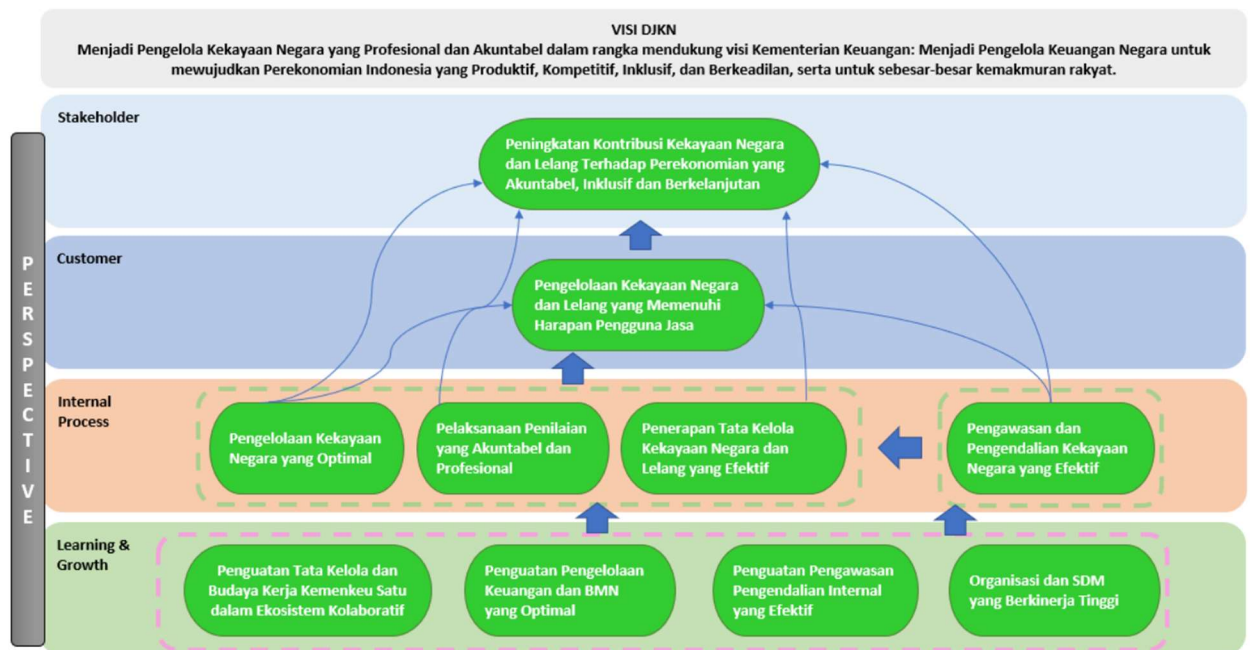
1. melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini;
2. bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan; dan
3. menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PETA STRATEGI SEBELUM ADENDUM



Gambar 3. Peta Strategi KPKNL Samarinda Tahun 2023 Sebelum Adendum

PETA STRATEGI SETELAH ADENDUM



Gambar 4. Peta Strategi KPKNL Samarinda Tahun 2023 Setelah Adendum



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023*
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%
		1c-CP	Indeks Integritas	88,67
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP	Pengelolaan BMN yang Optimal	84%
		3b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%
		4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%
		5b-CP	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%
		5c-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
6	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	86%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-N	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100
		8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
		8c-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
9	Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif	9a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60
10	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	10a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
		10b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (30 JP)	100%

*) Perjanjian Kinerja Tahun 2023 setelah adendum

Program/Kegiatan	Anggaran*
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp458.265.000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp4.984.000
2. Pengelolaan Aset	Rp453.281.000
Dukungan Manajemen	Rp1.682.486.000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp6.764.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1.660.570.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp6.240.000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp8.912.000

*) Pagu Revisi per 31 Desember 2023

RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA*

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2023

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	80%	80%	80%	80%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
1c-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	88,67	88,67
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
3a-CP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN	12%	40,67%	40,67%	57,5%	57,5%	84,00%	84,00%
3b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
5a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
5b-CP	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%
5c-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	-	-	75%	75%	100%	100%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	50%	-	-	86%	86%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
7a-N	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100	100	100	100	100	100	100
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,50	95,50	95,50	100	100	100	100
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	-	-	100%	100%
8c-N	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
9	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif							
9b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	-	-	-	-	-	60	60
10	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
10a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	80	80
10b-N	Persentase Pengembang Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%

*) Rincian Target Capaian Kinerja Tahun 2023 setelah adendum



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output / Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian / Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

SASARAN KERJA PEGAWAI*

No.	Rencana Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		Persentase Produktivitas Lelang	80%
		Indeks Integritas	88,67
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%



No.	Rencana Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN	84%
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%
		Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%
		Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
6	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	86%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
		Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15%
9	Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60
10	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%

*) Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2023 setelah adendum

C. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja DJKN Tahun 2023, DJKN berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut.

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU
4. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis sebagai berikut.

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *minimize*

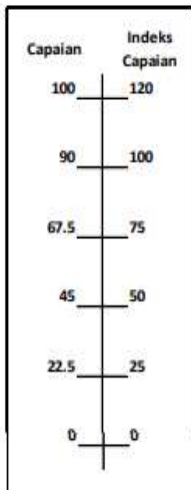
$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *stabilize*

$$I_n = I_{n-1} + \frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} (C_n - C_{n-1})$$

Grafik :



- I_n = Indeks capaian
- I_{n-1} = Indeks capaian dibawahnya
- I_{n+1} = Indeks capaian diatasnya
- C_a = Capaian awal = Realisasi/Target \times 100
- C_n = Capaian
 - **Apabila Realisasi > Target**, maka
 $C_n = 100 - (C_a - 100)$
note: C_a maksimum adalah 200
 - **Apabila Realisasi < Target** maka $C_n = C_a$
- C_{n-1} = Angka Capaian di bawah C_n
- C_{n+1} = Angka Capaian di atas C_n

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Dalam subbab ini disajikan capaian kinerja KPKNL Samarinda untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPKNL Samarinda sesuai dengan hasil pengukuran kinerja KPKNL Samarinda. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut.

K-Wide	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan							
	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2023	PoI/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	14,31%	60,96%	60,96%	81,11%	81,11%	120,88%	120,88%	
Capaian	143,08%	203,19%	203,19%	135,19%	135,19%	120,88%	120,88%	

K-Wide	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan							
	1b-CP Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2023	PoI/KP
Target	30%	45%	45%	80%	80%	80%	80%	MAX/ TLK
Realisasi	55,12%	65,51%	65,51%	91,87%	91,87%	133,04%	133,04%	
Capaian	183,72%	145,57%	145,57%	114,84%	114,84%	166,30%	166,30%	

K-Wide	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan							
	1c-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2023	PoI/KP
Target						88,67	88,67	MAX/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	89,17	89,17	
Capaian						100,56%	100,56%	



K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	10,58%	30,01%	30,01%	49,68%	49,68%	86,09%	86,09%	
Capaian	52,92%	75,02%	75,02%	70,97%	70,97%	86,09%	86,09%	

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	56,34%	75,70%	75,70%	96,88%	96,88%	210,35%	210,35%	
Capaian	563,43%	252,34%	252,34%	161,47%	161,47%	210,35%	210,35%	

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	3a-CP Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	12%	40,67%	40,67%	57,50%	57,50%	84,00%	84,00%	MAX/ TLK
Realisasi	39,74%	71,07%	71,07%	75,67%	75,67%	96,58%	96,58%	
Capaian	331,13%	174,75%	174,75%	131,60%	131,60%	114,97%	114,97%	

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	3b-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	38,69%	50,79%	50,79%	78,97%	78,97%	102,58%	102,58%	
Capaian	386,90%	169,31%	169,31%	131,61%	131,61%	102,58%	102,58%	

K-Wide	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	4a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	MAX/ TLK
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%	
Capaian	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200%	200%	



K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien						
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	70	70	70	70	70	70	70	MAX/ TLK
Realisasi	99,91	99,95	99,95	99,97	99,97	99,98	99,98	
Capaian	142,72%	142,79%	142,79%	142,81%	142,81%	142,82%	142,82%	

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	5a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction						
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	MAX/ TLK
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	
Capaian	106,38%	106,38%	106,38%	106,38%	106,38%	106,38%	106,38%	

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	5b-CP	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online						
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%	MAX/ TLK
Realisasi	100,00%	97,83%	97,83%	98,81%	98,81%	99,25%	99,25%	
Capaian	500,00%	244,57%	244,57%	156,84%	156,84%	115,40%	115,40%	

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	5c-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)						
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target				75%	75%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi				97,88%	97,88%	102,86%	102,86%	
Capaian				130,51%	130,51%	102,86%	102,86%	

K-Wide	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
	6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara						
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	-	50%	50%	-	-	86%	86%	MAX/ TLK
Realisasi	62,07%	77,94%	77,94%	91,18%	91,18%	91,18%	91,18%	
Capaian	-	155,88%	155,88%	-	-	106,02%	106,02%	



K-Wide	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
	7a-N Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target								MAX/ TLK
Realisasi	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	
Capaian								

K-Wide	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	8a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	95,50	95,50	95,50	100	100	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	114,60	114,60	114,60	120,00	120,00	107,76	107,76	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	107,76%	107,76%	

K-Wide	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target						100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	120%	120%	
Capaian						120%	120%	

K-Wide	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	8d-CP Deviasi Data PNBPFungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	MAX/ TLK
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,38%	0,38%	0,28%	0,28%	
Capaian	200,00%	200,00%	200,00%	197,50%	197,50%	198,13%	198,13%	

K-Wide	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							
	9b-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target						60	60	MAX/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	96,51	96,51	
Capaian						160,85%	160,85%	



K-Wide	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
	10a-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target						80	80	MAX/ TLK
Realisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	98,57	
Capaian						123,22%	123,22%	

K-Wide	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
	10b-N Persentase Pengembang Kompetensi Pegawai (30 JP)							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	29,29%	115,71%	115,71%	120,00%	120,00%	120%	120%	
Capaian	195,24%	289,29%	289,29%	160,00%	160,00%	120%	120%	

Dalam Pengukuran kinerja tahun 2023 KPKNL Samarinda mempunyai 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) IKU yang secara keseluruhan mempunyai persentase hasil yang cukup baik secara perspektif dan bobot.

2. Kinerja KPKNL Samarinda Tahun 2019-2023

Kinerja KPKNL Samarinda sejak tahun 2019-2023 secara garis besar dapat dikatakan cukup memuaskan meski ada beberapa target yang belum dapat tercapai khususnya pada tahun 2021 dan satu target pada tahun 2023. Meskipun demikian, seiring dengan mulai pulihnya perekonomian nasional, capaian kinerja KPKNL Samarinda pun tetap terjaga dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di atas 100 persen. Kinerja tersebut dapat dibagi dalam beberapa bidang sebagai berikut.

a. Pengelolaan Kekayaan Negara

Program pengelolaan kekayaan negara merupakan suatu peran yang sangat strategis bagi DJKN pada umumnya dan KPKNL Samarinda pada khususnya. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJKN tahun 2020-2024, telah ditetapkan 4 tujuan dan 4 sasaran strategis. Peran DJKN dalam sasaran tersebut diwujudkan dengan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial.

KPKNL Samarinda juga berusaha melakukan pengelolaan negara yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *the highest and best use*. Kinerja di bidang pengelolaan kekayaan negara dapat digambarkan sebagai berikut.

Program sertifikasi tanah pemerintah tahun 2019-2023 sebagaimana tabel berikut.

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2019	46	48	104,35%
2	2020	51	51	100,00%
3	2021	82	82	100,00%
4	2022	163	172	105,52%
5	2023	337	390	115,73%

Tabel 1. Kinerja Sertifikasi BMN Tahun 2019 – 2023

Dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, khususnya terkait pemanfaatan barang milik negara, terdapat kegiatan pendukung berupa penilaian BMN yang dikoordinasikan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah. Dalam kurun waktu 2019-2023 penilaian yang dilakukan adalah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN). Selain itu juga ada penilaian terhadap barang rampasan Bea Cukai dan Barang Milik Daerah (BMD).

Hasil dari pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah adalah berupa laporan Penilaian yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN maupun BMD.

b. Penerimaan dan Pengamanan Penerimaan Negara

Di bidang penerimaan dan pengamanan penerimaan negara ini mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor piutang negara dan juga penerimaan di sektor lelang. Ditilik dari data capaian kinerja sepanjang kurun waktu 5 tahun terakhir, dapat dikatakan kinerja KPKNL Samarinda pada tahun 2019-2023 cukup baik dan masih ada potensi yang dapat digali serta ditingkatkan lagi pada periode berikutnya. Adapun di sektor lelang, kinerja KPKNL Samarinda dalam kurun waktu 2019-2023 dapat digambarkan sebagai berikut.

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2019	151.989.000.000	126.506.082.773	83,23%
2	2020	136.800.000.000	137.279.334.372	100,35 %
3	2021	150.000.000.000	273.087.943.996	182,06 %
4	2022	164.000.000.000	254.733.364.278	155,33 %
5	2023	257.500.000.000	221.685.663.360	86,09 %

Tabel 2. Kinerja Capaian Pokok Lelang Tahun 2019-2023

Sedangkan di sektor piutang negara, kinerja KPKNL Samarinda tergambar dalam tabel berikut.

Tahun	BIAD			BKPN SELESAI		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2018	21.026.125	24.609.686	117,04	20	48	240
2019	15.988.134	46.389.073	290,15	79	145	183,54
2020	30.000.000	40.549.549	135,16	180	505	280,56
2021	35.000.000	74.671.022	213,35	400	557	139,25
2022	30.000.000	65.225.229	217,42	504	517	102,58

Tabel 3. Kinerja Piutang Negara 2019-2023

3. Upaya dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi organisasi dan pencapaian target kinerja, KPKNL Samarinda telah melakukan beberapa upaya selama tahun 2023 yang sejalan dengan visi DJKN menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Upaya atau tindakan yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut.

- a. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan
 - 1) Di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara telah dilakukan penyampaian permintaan data barang rampasan dari satker kejaksan setiap bulan serta identifikasi dan verifikasi BMN rusak berat di satker melalui Aplikasi SIMAN.
 - 2) Di bidang Lelang telah dilakukan penggalan potensi lelang kepada beberapa *stakeholder* dengan frekuensi permohonan lelang hak tanggungan terbanyak, penggalan potensi lelang kepada beberapa perbankan dengan frekuensi pengajuan lelang rendah, dan akselerasi permohonan lelang BMN.
 - 3) Di bidang Piutang Negara telah dilakukan pemanggilan kepada debitur dan melakukan penagihan baik secara daring maupun secara langsung (ke lapangan) serta melakukan penagihan secara intensif kepada debitur dengan nilai di atas 1 Miliar Rupiah.
- b. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa
 - 1) Di bidang Lelang telah dilakukan percepatan verifikasi permohonan lelang yang berpotensi laku.

- 2) Di bidang Piutang Negara telah dilakukan survei lapangan untuk pengurusan dan penagihan piutang negara yang optimal serta koordinasi dengan KPP, Dinas Kependudukan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait data debitur dalam rangka penerbitan PSBDT.
- c. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal
- 1) Di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara telah dilakukan koordinasi secara formal dan informal dengan Kantor Pertanahan dan satker target sertifikasi BMN dan Bidang PKN Kanwil DJKN terkait target K1 yang sesuai dgn penlok Kanwil ATR BPN sejumlah 22 bidang tanah, koordinasi terkait K2, K3, dan K4, survei lapangan terhadap portofolio aset, serta pendataan, pengukuran, dan perhitungan SBSB sebanyak 265 NUP.
 - 2) Di bidang Piutang Negara telah dilakukan koordinasi dengan penyerah piutang terkait berkas belum PSBDT serta pemeriksaan Piutang Negara dan survei lapangan untuk pengurusan Piutang Negara yang optimal.
- d. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional
- 1) Melaksanakan peer review konsep laporan penilaian dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan Seksi PKN terkait nilai yang akan digunakan untuk menetapkan persetujuan.
 - 3) Melakukan koordinasi dengan pemohon khususnya untuk data usulan nilai dari satker.
 - 4) Melakukan koordinasi dengan pemohon internal dan eksternal terkait usulan penilaian.
 - 5) Memitigasi keluhan pemohon terkait layanan yang lambat dengan melakukan monitoring pelaksanaan penilaian.
 - 6) Melakukan pemetaan terkait objek penilaian, ketersediaan SDM dan sebaran lokasi penilaian.
- e. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif
- 1) Metapkan jadwal lelang *e-Auction* dan *e-Conventional Auction*.
 - 2) Mengarahkan pemohon lelang untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan lelang secara online.
- f. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif
- 1) Melaksanakan koordinasi dengan satker yang telah menerima persetujuan sewa supaya segera melakukan perjanjian sewa dengan calon penyewa.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan satker terkait persetujuan penjualan yang sudah diajukan lelang namun belum laku.
- g. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

- 1) Edukasi seluruh pegawai mengenai prosedur penyediaan informasi publik dalam kegiatan *sharing knowledge*.
 - 2) Menunjuk UIC untuk bimbingan teknis penyediaan informasi publik PPID yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat DJKN
- h. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal
- 1) Melaksanakan pengelolaan anggaran dan BMN secara akuntabel dan berkelanjutan yang melibatkan seluruh pegawai dan menuangkannya dalam dokumen DIPA serta laporan pelaksanaan anggaran.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan Sekretariat DJKN serta pihak-pihak penyedia dalam pelaksanaan pengadaan BMN.
 - 3) Melaksanakan koordinasi dengan penyerah piutang, operator aplikasi dan PIC di Seksi Piutang Negara.
 - 4) Melakukan rekonsiliasi mandiri dari dropbox lelang KPKNL dengan PIC GLP KPKNL.
- i. Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif
- 1) Melaksanakan pemantauan dan pengendalian intern secara rutin.
 - 2) Melaporkan hasil pemantauan berupa LHPPU, Laporan Kode Etik dan Media Sosial kepada Pimpinan Unit.
- j. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi
- 1) Di bidang Kepatuhan Internal telah dilaksanakan Dialog Kinerja Organisasi, Rapat Manajemen Risiko, refinement kinerja dan risiko, serta penyampaian laporan hasil rapat DKO dan Manajemen Risiko.
 - 2) Di bidang pengelola kepegawaian telah dilaksanakan monitoring terhadap pengembangan kompetensi pegawai secara rutin dan *reminder* pegawai untuk melaporkan *progress* perkembangan kompetensi secara berkala.

4. Evaluasi dan Analisis Keberhasilan Kinerja

Dalam implementasi/penerapan konsep *balance scorecard* visi dan misi yang telah diformulasikan, selanjutnya diterjemahkan dalam sejumlah sasaran strategis. Adapun sasaran strategis didefinisikan sebagai pernyataan tentang yang ingin dicapai (*output* dan *outcome*) dan/atau apa yang ingin dilakukan atau apa yang seharusnya kita miliki (*input*).

Peta strategis merupakan suatu panel instrumen yang memetakan sasaran strategis KPKNL Samarinda. Untuk mencapai sasaran capaian kinerja tahun 2023, KPKNL Samarinda menggunakan 4 standar perspektif *balance scorecard* yaitu *Stakeholder*, *Customer*, *Internal Process*, dan *Learning & Growth*.

a. *Stakeholder Perspective* (30%)

Terhadap Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan

- a) Indikator Kinerja Utama Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang pada tahun 2023 tercapai sebesar 120,88% dari target awal sebesar 100% dengan nominal Rp25.239.577.701.00. Nilai manfaat ekonomi PNB dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang meliputi:
 - i. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pengelolaan BMN;
 - ii. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Piutang Negara; dan
 - iii. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Lelang.
- b) Indikator Kinerja Utama Persentase Produktivitas Lelang dapat terealisasi sebesar 133,04% dari target yang ditetapkan sebesar 80% yang didapat dari jumlah frekuensi lelang laku tahun 2023.
- c) Indikator Kinerja Utama Indeks Integritas tercapai sebesar 89,17 atau sebesar 100,56% dari target yang ditetapkan sebesar 88,67.

b. *Customer Perspective* (20%)

Mengukur standar penilaian kinerja terkait dengan *financial sustainability* dan yang berorientasi pada keinginan pengguna layanan. Aspek-aspek terkait hal ini antara lain sebagai berikut.

Terhadap Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

- a) Indikator Kinerja Utama Persentase Realisasi Pokok Lelang terealisasi sebesar 86,09% sehingga belum mencapai target yang ditetapkan. KPKNL Samarinda dapat merealisasikan Pokok Lelang Kelas I sebesar Rp102.132.840.560 dari target sebesar Rp106.560.000.000. Sementara dari sektor Pokok Lelang Pegadaian terealisasi sebesar Rp119.552.822.800 dari target sebesar Rp150.940.000.000. Pencapaian tersebut masih perlu ditingkatkan lagi pada periode selanjutnya. Mengetahui bahwa tahun ini pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut masing-masing dari Pokok Lelang Kelas I dan Pokok Lelang Pegadaian belum berhasil mencapai target. Hal ini menjadi catatan tersendiri untuk KPKNL Samarinda untuk dapat memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat lebih tertarik untuk menjadikan lelang sebagai salah satu pilihan dalam bertransaksi jual beli serta melakukan percepatan proses lelang mulai dari verifikasi berkas permohonan hingga administrasi dokumen pasca lelang. Mengingat sebagian wilayah di Kalimantan Timur akan dijadikan sebagai Ibu Kota Negara Indonesia. terdapat potensi akan meningkatnya minat beli masyarakat terhadap lelang di wilayah kerja KPKNL Samarinda.
- b) Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara terealisasi sebesar Rp3.050.057.128 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.450.000.000 dengan capaian 210,35%.

c. *Internal Process Perspective* (25%)

Mengukur suatu proses dalam memberikan layanan kepada *Stakeholder* dan *Customer*.

1) Terhadap Sasaran Strategi Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

a) Indikator Kinerja Utama Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN mencapai 96,58% dari target awal sebesar 84% dengan capaian 114,97%. Persentase optimalisasi pengelolaan BMN yang cukup tinggi tersebut menunjukkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal. Implikasi kekayaan negara yang dioptimalkan pengelolaannya meliputi:

- i. tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK mencapai 77,43% yang diperoleh dari optimalisasi K/L baru sebesar 77,14% dengan bobot 75% dan optimalisasi tahun sebelumnya sebesar 78,30% dengan bobot 25%; dan
- ii. persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan mencapai 290 bidang dari target 337 bidang tanah.

b) Indikator Kinerja Utama Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang ditargetkan sebanyak 504 KPKNL Samarinda berhasil menyelesaikan berkas BKPN Sebanyak 517 dengan indeks capaian 102,58%.

2) Terhadap Sasaran Strategi Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

a) Indikator Kinerja Utama Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian mencapai hasil maksimal karena tidak adanya deviasi atau deviasi sebesar 0% dari target 25%.

b) Indikator Kinerja Utama Deviasi Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien dengan indeks target 70 terealisasi sebesar 99,98 atau 142,82%.

3) Terhadap Sasaran Strategi Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

a) Indikator Kinerja Utama Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Convention Auction* terealisasi sebesar 100% dari target 94% dengan nilai capaian sebesar 106,38% dengan rincian 704 frekuensi lelang *E-Auction*.

b) Indikator Kinerja Utama Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang *Online* tercapai sebesar 99,25% dari target pelaksanaan permohonan lelang *online* 86% dengan nilai capaian 115,40% dengan rincian 798 dari total 795 permohonan lelang telah dilaksanakan secara *online*.

c) Indikator Kinerja Utama Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) merinci jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya sejumlah 102 aset dan jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker sejumlah 8 rekomendasi dari target yang ditetapkan sebanyak 7 rekomendasi. Jumlah tersebut mencapai 102,86% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

4) Terhadap Sasaran Strategi Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

Indikator Kinerja Utama Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang terealisasi sebesar 91,18% dari target 86% dengan indeks capaian 106,02%.

d. *Learning & Growth Perspective* (25%)

Menggambarkan kemampuan SDM dalam unit organisasinya untuk melakukan perbaikan dan perubahan.

1) Terhadap Sasaran Strategi Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

Indikator Kinerja Utama Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik tidak dapat nilai karena tidak tersedianya data permintaan informasi publik selama tahun 2023.

2) Terhadap Sasaran Strategi Penguatan Pengelolaan BMN yang Optimal

a) Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran dari target 100 dapat terealisasi sebesar 107,76.

b) Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan dapat terealisasi secara maksimal sebesar 120% dari target 100%.

c) Indikator Kinerja Utama Deviasi PNBPN Fungsional DJKN dengan polarisasi minimal dapat terealisasi sebesar 0,28% dari batas maksimum atau target sebesar 15% dengan indeks capaian 198,13%.

3) Terhadap Sasaran Strategi Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif

Indikator Kinerja Utama Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif tercapai sebesar 96,51 atau sebesar 160,85% dari target yang ditetapkan sebesar 60.

4) Terhadap Sasaran Strategi SDM yang Berkinerja Tinggi

a) Indikator Kinerja Utama Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko tercapai sebesar 98,57 atau sebesar 123,22% dari target yang ditetapkan sebesar 80.

b) Indikator Kinerja Utama Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (30 JP) mendapatkan nilai capaian yang memuaskan dari target yang ditetapkan sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 120%.

5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berpedoman pada Instruksi Menteri Keuangan Nomor 346/IMK.01/2017 tentang Gerakan Efisiensi Sebagai Bagian Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan dan Instruksi Menteri Keuangan Nomor 595/IMK.01/2019 tentang Pelaksanaan Efisiensi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja, dan Honorarium

Jasa Profesi di Lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Samarinda secara konsisten menerapkan gerakan efisiensi terkait pelaksanaan tugas maupun anggaran birokrasi.

Seksi Kepatuhan Internal sebagai Unit Kepatuhan Internal (UKI) KPKNL Samarinda secara periodik melakukan reviu atas gerakan efisiensi yang terlaksana dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-1/MK.9/2019 tentang Pedoman *Review* Pelaksanaan Gerakan Efisiensi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Terdapat 8 (delapan) aspek efisiensi di Kementerian Keuangan, yaitu pelaksanaan lembur, percepatan layanan, pengelolaan rapat, perjalanan dinas, jamuan rapat, honorarium narasumber/tim kerja, penggunaan daya dan jasa, dan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi anggaran pada Aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran, pada tahun 2023 KPKNL Samarinda mencapai efisiensi anggaran dengan nilai 78,44. Hasil tersebut diperoleh melalui keberhasilan KPKNL Samarinda dalam mengelola sumber daya berupa anggaran yang optimal, efektif, dan efisien dalam melaksanakan dan mencapai target-target *output* yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023.

6. Program/Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Selama tahun 2023, KPKNL Samarinda berhasil meraih 3 (tiga) prestasi tingkat nasional, di antaranya adalah Penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan, Juara-2 Penghargaan Pengelolaan Arsip Unit Vertikal DJKN Tahun 2023, dan Peringkat-3 Implementasi *Learning Organization* DJKN. Berbagai kegiatan dan inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Samarinda yang telah dilaksanakan sejalan dengan pencapaian kinerja tahun 2023. Beberapa inovasi program/kegiatan penunjang capaian kinerja tahun 2023 yang telah berjalan di tahun-tahun sebelumnya maupun yang baru dikembangkan di tahun 2023 antara lain sebagai berikut.

a. SIPESUT

Sistem Informasi Pelayanan Satu Pintu merupakan Area Pelayanan Terpadu (APT) daring KPKNL Samarinda. Memberikan kemudahan kepada pengguna layanan untuk berkonsultasi secara *online* melalui pesan ataupun Aplikasi Zoom. Dilengkapi dengan fitur layanan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang

b. SIPUAN

SIPUAN (Sistem Informasi Pengelolaan Aduan) merupakan sarana *Whistleblowing System* yang dapat dimanfaatkan bagi pihak internal maupun eksternal yang memiliki informasi dan ingin melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi pelanggaran atas kode etik, disiplin dan penyimpangan layanan oleh pegawai yang terjadi di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda.

c. QRCODE

Kumpulan Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) layanan unggulan yang meliputi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.

d. KUL.ID

Aplikasi yang berisi peraturan terkait lelang dan kalkulator perhitungan bea lelang laku bagi penjual dan pembeli sesuai dengan jenis dan tarif yang berlaku.

e. LUNASWAL

Aplikasi pencatatan pembayaran utang serta saldo hutang sebagai pengingat dan memudahkan *stakeholder* dalam memonitor pembayaran pembayaran utang serta saldo hutang.

f. KONSUMEN PKN

Aplikasi *tracking* surat agar memudahkan *stakeholder* mengetahui perkembangan surat yang telah disampaikan kepada KPKNL Samarinda.

g. SLOPKN

Formulir survei lapangan kekayaan negara berbasis digital untuk tanah, bangunan, kendaraan, peralatan/ mesin, dan lainnya.

h. SIAP Arsip

Guna mendukung pengelolaan arsip yang profesional maka aplikasi Sistem Arsip (SIAP) KPKNL Samarinda diimplementasikan untuk mendukung penataan arsip. Pengelolaan arsip melalui Aplikasi SIAP Arsip memberikan beberapa keunggulan, di antaranya adalah aplikasi memiliki basis web dan *smartphone*, keamanan aplikasi terjamin, adanya fitur cari/search yang menyeluruh, penginputan data kode klasifikasi dan jenis berkas yang mudah, serta masa aktif dan masa inaktif arsip terinformasikan dengan mudah.

i. PESUT ETAM (Pelayanan Suara untuk Etam)

Dalam rangka membangun unit pelayanan publik ramah kelompok rentan, KPKNL Samarinda menghadirkan inovasi PESUT ETAM atau Pelayanan Suara untuk ETAM yang dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder* penyandang tunanetra. Inovasi ini juga dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar unit pelayanan publik ramah kelompok rentan seperti tombol bantuan/darurat, *guiding block*, jalur landai, parkir, ruang tunggu, dan toilet prioritas, *hearing aid*, kruk, kursi roda, dan sebagainya. Berbagai inovasi yang digagas dan dilaksanakan dalam bentuk aplikasi maupun program/kegiatan tersebut menjadi pendorong percepatan layanan KPKNL Samarinda kepada *stakeholder*.

7. Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Dalam menjaga efektivitas kinerja dalam mencapai target kinerja, KPKNL Samarinda melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi dan Manajemen Risiko setiap triwulan. Kegiatan ini salah satunya bertujuan untuk mengevaluasi hasil kinerja dan tindakan yang telah dilaksanakan atau direncanakan pada periode sebelumnya, menyusun rencana aksi, serta memetakan profil risiko KPKNL Samarinda.

Berikut merupakan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan oleh KPKNL Samarinda sebagai upaya mencapai target selama tahun 2023.

a. Pengelolaan Kekayaan Negara

- 1) Melaksanakan penggalian potensi BMN rusak berat dan wasdal terkait BMN tidak dioptimalkan
- 2) Rapat koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan satker target dan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara terkait percepatan sertifikasi BMN tahun 2023
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi evaluasi kinerja dari satker target portofolio aset
- 4) Melaksanakan evaluasi kegiatan sertifikasi dengan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara

b. Piutang Negara

- 1) Melakukan koordinasi dengan Pemda Kutai Kartanegara terkait BKPN yang belum PSBDT
- 2) Melakukan penggalian potensi piutang negara untuk meningkatkan PNPB

c. Lelang

- 1) Melaksanakan lelang sukarela/UMKM
- 2) Melakukan penggalian potensi lelang hak tanggungan dari pihak perbankan dan lelang BMN ke Pemerintah Kabupaten/Kota

d. Penilaian

- 1) Menyusun jadwal monitoring/agendaris Penilaian

8. Rencana Aksi

Di samping mendukung dan memanfaatkan isu strategis pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur untuk menjaring minat masyarakat untuk mengikuti lelang terutama di bidang properti dan memaksimalkan pengelolaan aset di Kota Samarinda sebagai daerah penyangga Ibu Kota yang baru, pada tahun 2024 KPKNL Samarinda menyusun rencana aksi utama sebagai berikut.

- a. Melaksanakan evaluasi kegiatan sertifikasi dengan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara

- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas rekomendasi kinerja dari satker target portofolio aset
- c. Melakukan penggalian potensi Piutang Negara untuk meningkatkan PNPB
- d. Melakukan penggalian potensi lelang ke perbankan untuk meningkatkan PNPB
- e. Melaksanakan lelang sukarela/UMKM

B. REALISASI ANGGARAN

Dengan berakhirnya proses e-Rekon & LK KPKNL Samarinda, berdasarkan data sampai dengan 31 Desember 2023 terhitung realisasi belanja unit KPKNL Samarinda pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp1.970.880.829** atau **92,06%** dari total pagu revisi dalam DIPA KPKNL Samarinda sebesar **Rp2.140.751.000**.

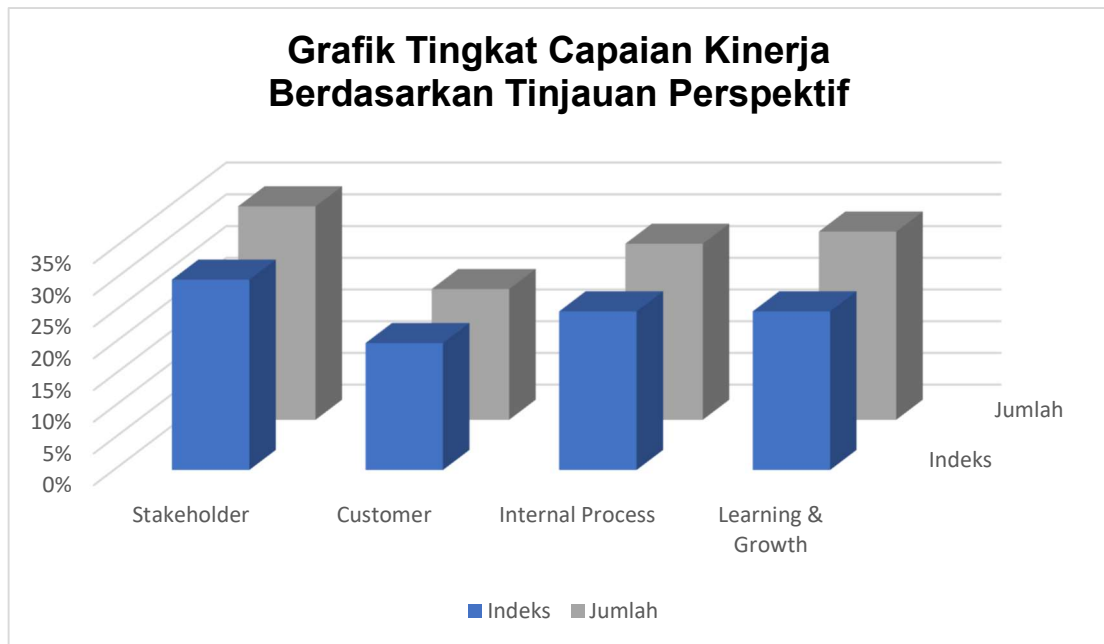
Realisasi anggaran tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut.

Program/Kegiatan	Pagu Revisi	Realisasi
Jumlah Seluruhnya	Rp2.140.751.000	Rp1.970.880.829
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp458.265.000	Rp370.845.981
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp4.984.000	Rp1.720.000
2. Pengelolaan Aset	Rp453.281.000	Rp369.125.981
Dukungan Manajemen	Rp1.682.486.000	Rp1.600.034.848
1. Legislasi dan Litigasi	Rp6.764.000	Rp2,908,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1.660.570.000	Rp1.586.554.848
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp6.240.000	Rp1.700.000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp8.912.000	Rp8.872.000

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda tahun 2023 ditetapkan sesuai dengan Peta 1 Kemenkeu *Three DJKN* yang terdiri dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil evaluasi kinerja apabila dilihat dari tinjauan perspektif dapat dilihat pada grafik dan tabel dibawah ini.



Gambar 5. Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 Berdasarkan Tinjauan Perspektif

NO	PERSPEKTIF	INDEKS	JUMLAH
1	<i>Stakeholder Perspective</i>	30%	33,64%
2	<i>Customer Perspective</i>	20%	20,61%
3	<i>Internal Process Perspective</i>	25%	27,75%
4	<i>Learning & Growth Perspective</i>	25%	29,66%
JUMLAH CAPAIAN KINERJA		100%	111,66%

Tabel 4. Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 Berdasarkan Tinjauan Perspektif

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dilihat pada grafik dan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat pencapaian sasaran tahun 2023 adalah **111,66%**. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja KPKNL Samarinda tahun 2023 secara

rata-rata telah melampaui indeks yang ditetapkan. Dengan tercapainya realisasi *stakeholder perspective* tercapai sebesar 33,64% dapat diartikan bahwa tujuan utama organisasi terutama dalam peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan, sejalan dengan capaian *customer perspective* tercapai sebesar 20,61% dalam pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa yang berpengaruh pada kepuasan pengguna layanan yang tinggi. Demikian pula dengan realisasi *internal process perspective* sebesar 27,75% dan *learning & growth perspective* sebesar 29,66%, menandakan bahwa proses investasi yang berupa peningkatan SDM, anggaran yang maksimal, serta pelaksanaan proses organisasi sesuai dengan aturan yang berlaku telah mendukung keberhasilan tujuan organisasi.

B. HAMBATAN DAN HARAPAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta upaya mencapai target organisasi tahun 2023, KPKNL Samarinda menemui beberapa hambatan terutama dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, lelang, dan penilaian di antaranya sebagai berikut.

1. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
 - a. Terdapat beberapa BMN yang tidak ditemukan, salah pencatatan, dan beberapa ketidaksesuaian lainnya yang menghambat pelaksanaan pengukuran/perhitungan SBSK BMN.
 - b. Terdapat NUP Rumah Negara yang tidak memiliki SIP dan dalam kondisi rusak berat.
 - c. Persetujuan KPKNL tidak ditindaklanjuti dengan penyetoran ataupun bukti setor PNPB dan surat perjanjian pemanfaatan.
 - d. Terdapat BMN yang telah mendapat SK Persetujuan Pemindahtanganan BMN melalui lelang tidak laku terjual.
 - e. Persetujuan KPKNL ditindaklanjuti penyetoran namun tidak sesuai dengan nilai persetujuan dari KPKNL dan perodesasi sewa.
2. Seksi Piutang Negara
 - a. Nilai hutang di atas 500 juta sehingga memerlukan pemeriksaan Piutang Negara sebelum dilakukan PSBDT.
 - b. Kesulitan memperoleh data keberadaan dan kemampuan debitur.
3. Pelayanan Lelang
 - a. Sebagian besar permohonan lelang merupakan lelang eksekusi hak tanggungan dengan dominasi hasil lelang TAP.
 - b. Sumbangsih PNPB dari Pegadaian belum maksimal karena kendali di luar KPKNL.
 - c. Pelaksanaan lelang barang rampasan kejaksaan hanya dapat dilakukan satu kali lelang.

- d. Frekuensi lelang sukarela rendah.
- e. Terdapat potensi permohonan lelang dari Kepala Desa atas aset berupa BMDes yang belum diakomodir di PMK 213 untuk pelaksanaan lelang.

4. Pelayanan Penilaian

- a. Adanya nilai deviasi antara Nilai Wajar persetujuan dan Nilai wajar.
- b. Faktor pertimbangan lain oleh Pemohon tidak diakomodir Penilai dalam penentuan Nilai Wajar sehingga hasil penilaian tidak dapat ditindaklanjuti Pemohon.

Dari beberapa hambatan dan kendala yang ditemui tersebut, KPKNL Samarinda berharap terus memperoleh dukungan untuk dapat melanjutkan mitigasi risiko yang telah dilaksanakan maupun rencana aksi yang akan dilakukan di kemudian hari dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi dalam upaya pencapaian target organisasi.

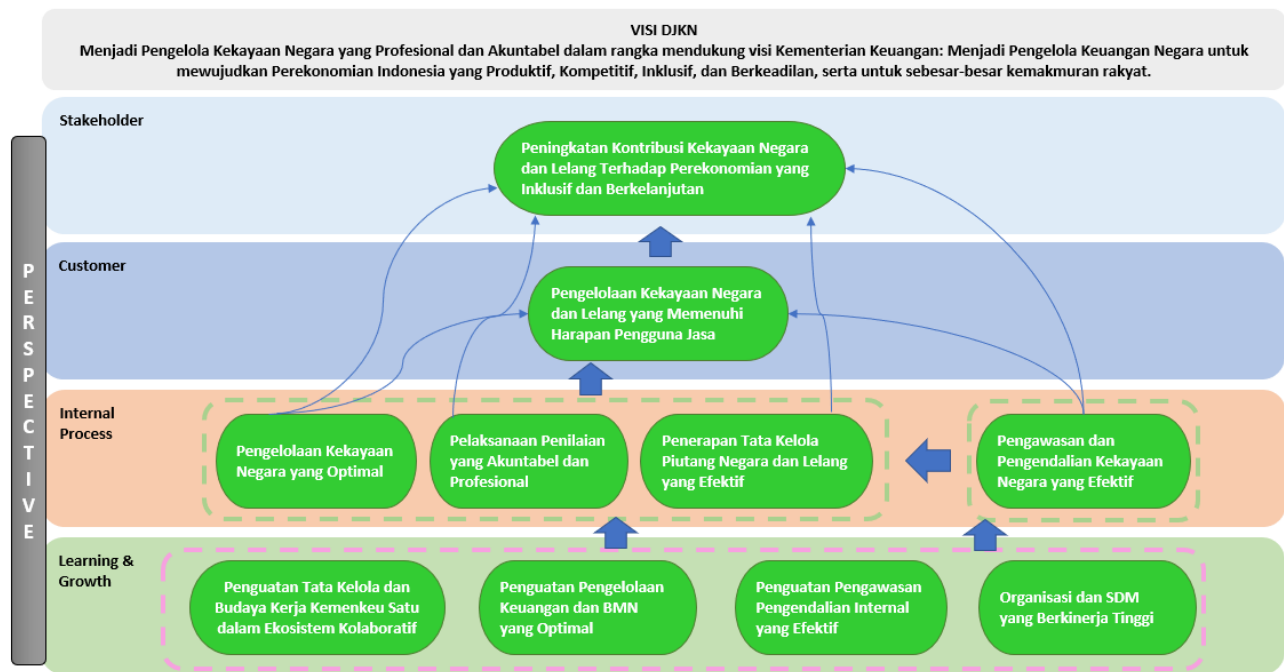
Langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan KPKNL Samarinda dalam meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan adalah dengan melanjutkan sinergi dan koordinasi dengan DJKN Pusat, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, dan seluruh *stakeholder* baik instansi pemerintah pusat/daerah, perbankan, UMKM, dan masyarakat. Di samping itu, KPKNL Samarinda akan melanjutkan penggalian potensi PNBPN dari pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang melalui monitoring dan evaluasi langsung dengan kunjungan ke lapangan maupun tidak langsung melalui aplikasi pendukung dan persuratan dengan tindak lanjut penyampaian rekomendasi tindak lanjut melalui surat dinas maupun kunjungan ke lapangan untuk mewujudkan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang terhadap perekonomian yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) ini, kami berharap dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Samarinda, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja (LAKIN) tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi. Secara eksternal, Laporan Kinerja (LAKIN) harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholder*. Dengan demikian pada akhirnya DJKN dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang profesional.



**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-02/WKN.13/2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG SAMARINDA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SAMARINDA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP	Pengelolaan BMN yang Optimal	89,33%
		3b-CP	Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKPN	100%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%
		4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%
		5b-CP	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%
		5c-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-N	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
		8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
		8c-N	Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	10%
9	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif	9a-CP	Indeks Integritas Organisasi	94,33
		9b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60
10	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	10a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
		10b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%



Program/ Kegiatan Tahun 2023

Anggaran

Program :

Pengelolaan Perbendaharaan , Kekayaan Negara dan Risiko

Rp 333.308.000

Kegiatan :

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi

Rp 4.984.000

2. Pengelolaan Aset

Rp 328.324.000

Program :

Dukungan Manajemen

Rp 1.682.486.000

Kegiatan :

1. Legislasi dan Litigasi

Rp 6.764.000

2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

Rp 1.660.570.000

3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik

Rp 6.240.000

4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal

Rp 8.912.000

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan
Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
Kusumawardhani

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Samarinda



Ditandatangani Secara Elektronik
Bagus Kurniawan



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SAMARINDA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
3a-CP	Pengelolaan BMN yang Optimal	12%	40,67 %	40,67 %	63,33 %	63,33 %	89,33 %	89,33 %
3b-CP	Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKPN	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
5a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
5b-CP	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%
5c-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	50%	-	50%	86%	86%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
7a-N	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100	100	100	100	100	100	100
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5 %	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%
8c-N	Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	-	-	-	-	-	10%	10%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
9	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif							
9a-CP	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	94,33	94,33
9b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	-	-	-	-	-	60	60
10	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
10a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	80	80
10b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
Dan Lelang Samarinda,



Ditandatangani Secara Elektronik
Bagus Kurniawan



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian / Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan / dimanfaatkan	Q1: Daftar Aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Samarinda



Ditandatangani Secara Elektronik
Bagus Kurniawan



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Bagus Kurniawan, S.S.T., Ak., M.A.	NAMA	Kusumawardhani	
NIP	198208212003121002	NIP	196908231996032001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Penata Tingkat I, III/d	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Samarinda	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Samarinda	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase Produktivitas Lelang	80%	Penerima Layanan
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	Penerima Layanan



3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Pengelolaan BMN yang Optimal	89,33%	Proses Bisnis
		Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKN	100%	Proses Bisnis
4.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	Proses Bisnis
		Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	Proses Bisnis
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Pelaksanaan Lelang E- Auction dan E-Conventional Auction	94%	Proses Bisnis
		Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%	Proses Bisnis
		Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	Proses Bisnis
6.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	Proses Bisnis
7.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100	Penguatan Internal atau Anggaran
8.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	10%	Penguatan Internal atau Anggaran



9.	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks Integritas Organisasi	94,33	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan</p>



PERILAKU KERJA

- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

31 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,



Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Bagus Kurniawan
198208212003121002

Ditandatangani secara elektronik
Kusumawardhani
196908231996032001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	31 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
3	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
4	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
5	Pengelolaan BMN yang Optimal	12%	40,67 %	40,67 %	63,33 %	63,33 %	89,33 %	89,33 %
6	Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKPN	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
7	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%



8	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
9	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
10	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%
11	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
12	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	50%	-	50%	86%	86%
13	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100	100	100	100	100	100	100
14	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5 %	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
15	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%
16	Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	-	-	-	-	-	10%	10%
17	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	94,33	94,33
18	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	-	-	-	-	-	60	60
19	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	80	80
20	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%



KONSEKUENSI

- | | |
|----|---|
| 1. | Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku. |
| 2. | Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. |

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Bagus Kurniawan
198208212003121002

31 Januari 2023
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Kusumawardhani
196908231996032001

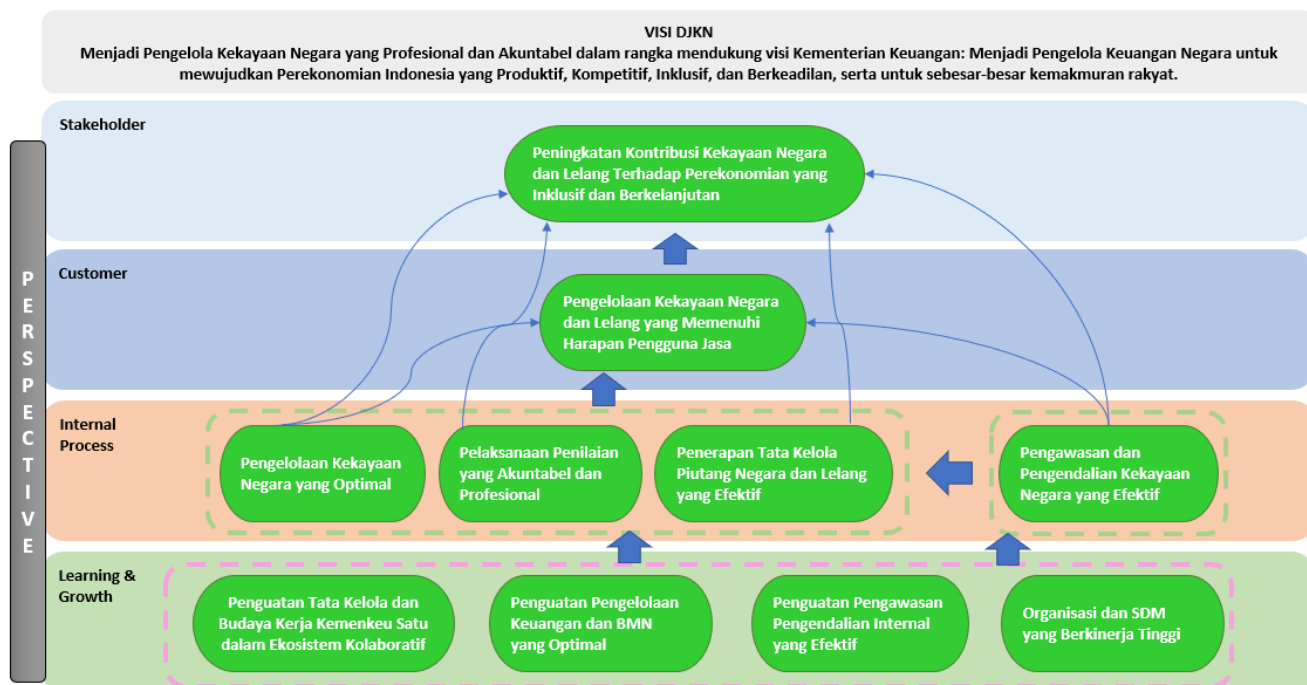


ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

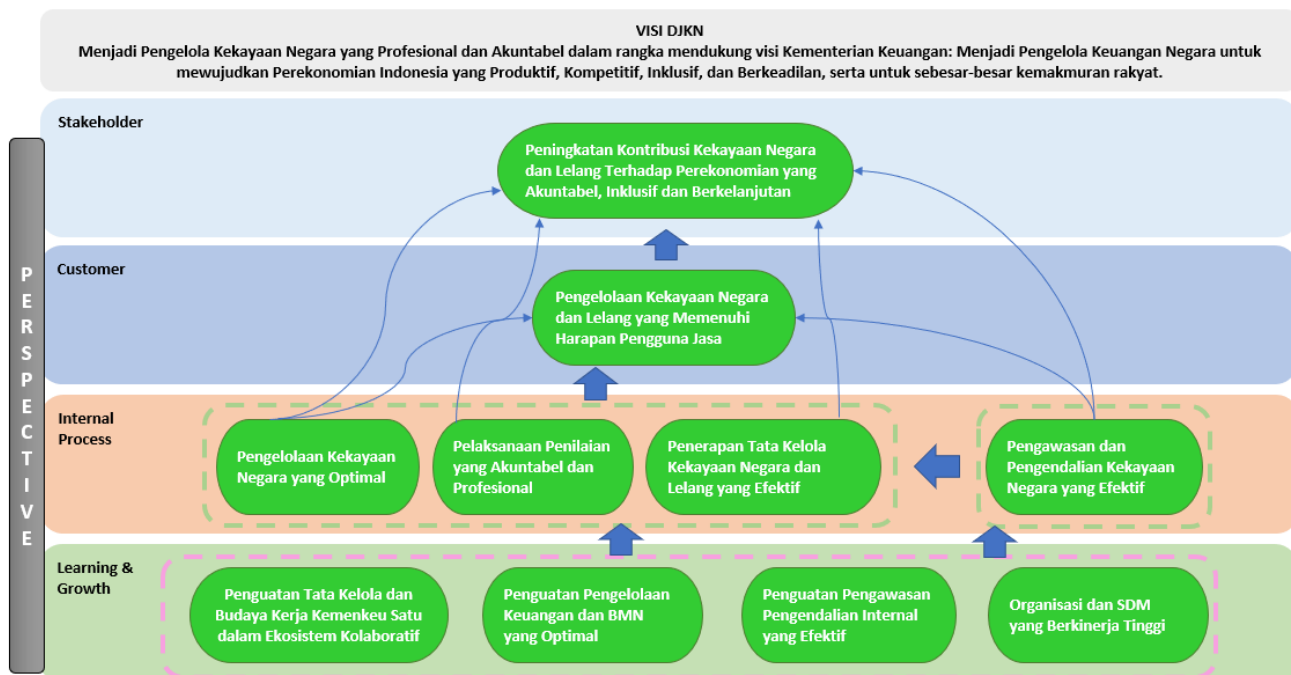
NOMOR: PK-02A/WKN.13/2023

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja nomor PK-02/WKN.13/2023 tanggal 31 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Peta Strategis sebelum adendum:



Peta Strategis setelah adendum:



a. Perubahan Nama Sasaran Strategis

Sebelum		Menjadi	
Kode SS	Sasaran Strategis	Kode SS	Sasaran Strategis
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

b. Reposisi Indikator Kinerja Utama antar Sasaran Strategis

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
<i>Internal process perspective</i>						<i>Learning and growth perspective</i>					
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal				
5c-CP	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	8d-CP	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%

c. Perubahan Nama IKU

Sebelum		Menjadi	
Kode IKU	Nama IKU	Kode IKU	Nama IKU
3a-CP	Pengelolaan BMN yang Optimal	3a-CP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN

d. Penambahan IKU

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
-	-	-	-	-	-	1c-CP	Indeks Integritas	-	-	88,67	88,67
-	-	-	-	-	-	5c-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%

e. Penghapusan IKU

Sebelum		Menjadi	Penjelasan
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama		
8c-N	Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	-	IKU dihapus dari PK Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda.
9a-CP	Indeks Integritas Organisasi	-	IKU dihapus dari PK Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda.

f. Perubahan Trajectory Target IKU

Sebelum						Menjadi					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80%	80%	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	80%	80%	80%
3a-CP	Pengelolaan BMN yang Optimal	63,33%	63,33%	89,33%	89,33%	3a-CP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN	57,5%	57,5%	84%	84%
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	85%	85%	100%	100%	8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	100%	100%

Adendum PK ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Samarinda, 27 September 2023

Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
Jose Arif Lukito

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda



Ditandatangani Secara Elektronik
Bagus Kurniawan



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda tanggal 31 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase Produktivitas Lelang	80%	Penerima Layanan
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Pengelolaan BMN yang Optimal	89,33%	Proses Bisnis
		Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKPN	100%	Proses Bisnis
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Pelaksanaan E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	Proses Bisnis
		Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%	Proses Bisnis
		Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	Proses Bisnis
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	10%	Penguatan Internal atau Anggaran



Sebelum				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
9	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks Integritas Organisasi	94,33	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60	Penguatan Internal atau Anggaran

Menjadi				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase Produktivitas Lelang	80%	Penerima Layanan
		Indeks Integritas	88,67	Penerima Layanan
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN	84%	Proses Bisnis
		Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKPN	100%	Proses Bisnis
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Pelaksanaan E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	Proses Bisnis
		Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Proses Bisnis
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	15%	Penguatan Internal atau Anggaran



Menjadi				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
9	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60	Penguatan Internal atau Anggaran

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Skema pertanggungjawaban

1. Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

Sebelum						Menjadi					
No	IKI	Target				No	IKI	Target			
		Q3	s.d.Q3	Q4	Y			Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	60%	60%	100%	100%	1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	60%	60%	100%	100%
2	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80%	80%	2	Persentase Produktivitas Lelang	80%	80%	80%	80%
3	Persentase Realisasi Pokok Lelang	70%	70%	100%	100%	3	Indeks Integritas	-	-	88,67	88,67
4	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	60%	60%	100%	100%	4	Persentase Realisasi Pokok Lelang	70%	70%	100%	100%



Sebelum						Menjadi					
No	IKI	Target				No	IKI	Target			
		Q3	s.d.Q3	Q4	Y			Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5	Pengelolaan BMN yang Optimal	63,33%	63,33%	89,33%	89,33%	5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	60%	60%	100%	100%
6	Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKPN	60%	60%	100%	100%	6	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN	57,5%	57,5%	84%	84%
7	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	7	Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKPN	60%	60%	100%	100%
8	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	8	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%
9	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	9	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70
10	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	63%	63%	86%	86%	10	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%
11	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	11	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	63%	63%	86%	86%
12	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	86%	86%	12	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%
13	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100	100	100	100	13	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	86%	86%



Sebelum						Menjadi					
No	IKI	Target				No	IKI	Target			
		Q3	s.d.Q3	Q4	Y			Q3	s.d.Q3	Q4	Y
14	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	14	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100	100	100	100
15	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	85%	85%	100%	100%	15	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100
16	Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	-	-	10%	10%	16	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	100%	100%
17	Indeks Integritas Organisasi	-	-	94,33	94,33	17	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%
18	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	-	-	60	60	18	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	-	-	60	60
19	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	80	80	19	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	80	80
20	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	75%	75%	100%	100%	20	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	75%	75%	100%	100%



Adendum SKP ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Samarinda, 27 September 2023

Menyetujui,

Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Samarinda,



Ditandatangani Secara Elektronik

Jose Arif Lukito



Ditandatangani Secara Elektronik

Bagus Kurniawan



NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
PERIODE TRIWULAN IV
TAHUN 2023

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(30%)							33.64%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan							112.14%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	120.88%	14%	30%	120.88%	120.00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	133.04%	14%	30%	166.30%	120.00%	hijau
1c-CP	Indeks Integritas	P/L	88.67	89.17	19%	40%	100.56%	100.56%	hijau
	Customer Perspective(20%)							20.61%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							103.05%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	86.09%	14%	50%	86.09%	86.09%	kuning
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	210.35%	14%	50%	210.35%	120.00%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)							27.75%	
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							109.72%	
3a-CP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN	P/L	84.00%	96.58%	19%	58%	114.97%	114.97%	hijau
3b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	102.58%	14%	42%	102.58%	102.58%	hijau
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120.00%	
4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	25%	0.00%	14%	50%	200.00%	120.00%	hijau
4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	P/M	70	99.98	14%	50%	142.82%	120.00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							108.21%	
5a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	94%	100.00%	14%	33%	106.38%	106.38%	hijau
5b-CP	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang online	P/M	86%	99.25%	14%	33%	115.40%	115.40%	hijau
5c-CP	Persentase Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/M	100%	102.86%	14%	33%	102.86%	102.86%	hijau
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							106.02%	
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	P/L	86%	91.18%	19%	100%	106.02%	106.02%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)							29.66%	
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif								
7a-N	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	P/M		#NA					abu-abu
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							115.92%	
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100	107.76	14%	33%	107.76%	107.76%	hijau
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	120.00%	14%	33%	120.00%	120.00%	hijau
8d-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	P/M	15.00%	0.28%	14%	33%	198.13%	120.00%	hijau
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							120.00%	
9b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	P/M	60	96.51	14%	100%	160.85%	120.00%	hijau
10	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							120.00%	
10a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	P/M	80	98.57	14%	50%	123.22%	120.00%	hijau
10b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP)	P/M	100%	120.00%	14%	50%	120.00%	120.00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								111.66%	hijau

Mengetahui,
Kepala KPKNL Samarinda
Selaku Submanajer Kinerja



Ditandatangani secara elektronik
Bagus Kurniawan

Kepala Seksi Kepatuhan Internal
Selaku Administrator Kinerja Organisasi



Ditandatangani secara elektronik
Wirta



DATA CAPAIAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
s.d. DESEMBER
TAHUN 2023

SS	Kode IKU	V/C	URAIAN	Target 2023	Capaian Q1	Capaian s.d. Q2	Capaian s.d. Semester 1	Capaian Q3	Capaian s.d. Q3	Capaian Q4	Capaian sd. Q4 (Tahun 2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1 Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan											
	1a-CP	P/M	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	MAX/TLK							
	a		Target/Realisasi PNBPN BMN	Rp 12.400.000.000	Rp 1.424.261.719	Rp 7.339.743.022	Rp 7.339.743.022	Rp 11.841.064.774	Rp 11.841.064.774	Rp 17.541.349.006	Rp 17.541.349.006
	b		Target/Realisasi PNBPN Piutang Negara	Rp 30.000.000	Rp 21.517.688	Rp 28.703.510	Rp 28.703.510	Rp 40.743.431	Rp 40.743.431	Rp 65.225.229	Rp 65.225.229
	c		Target/Realisasi PNBPN Lelang	Rp 8.450.000.000	Rp 1.126.800.901	Rp 3.591.708.813	Rp 3.591.708.813	Rp 5.054.178.359	Rp 5.054.178.359	Rp 7.633.003.466	Rp 7.633.003.466
	TOTAL		Jumlah target/realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Rp 20.880.000.000	Rp 2.572.580.308	Rp 10.960.155.345	Rp 10.960.155.345	Rp 16.935.986.564	Rp 16.935.986.564	Rp 25.239.577.701	Rp 25.239.577.701
	Capaian IKU				12,32%		52,49%		81,11%		120,88%
	1b-CP	P/M	Persentase produktivitas lelang	MAX/TLK							
			Persentase Lot laku Lelang (max 105%)		105,00%	105%	105,00%	105%	105%	105%	105%
			Jumlah Frekuensi lelang	462	101,00	182	182,00	384	384	701	701
			% Frekuensi Lelang		21,86%	87,54%	39,39%	83,12%	83,12%	151,73%	151,73%
	Capaian IKU				80,00%	55,12%	65,64%		91,87%		133,04%
	1c-CP	P/L	Indeks Integritas	Max/TLK							
			Target/Realisasi	88,67						89,17	89,17
	Capaian IKU										89,17
2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa											
	2a-CP	P/M	Persentase Realisasi Pokok Lelang	MAX/TLK							
			Pokok Lelang Kelas I	Rp 106.560.000.000	Rp 16.282.922.026	Rp 43.247.080.857	Rp 43.247.080.857	Rp 65.427.702.886	Rp 65.427.702.886	Rp 102.132.840.560	Rp 102.132.840.560
			Pokok Lelang Pegadaian	Rp 150.940.000.000	Rp 10.969.662.700	Rp 34.026.976.500	Rp 34.026.976.500	Rp 62.496.163.200	Rp 62.496.163.200	Rp 119.552.822.800	Rp 119.552.822.800
			Target/Realisasi Pokok Lelang	Rp 257.500.000.000	Rp 27.252.584.726	Rp 77.274.057.357	Rp 77.274.057.357	Rp 127.923.866.086	Rp 127.923.866.086	Rp 221.685.663.360	Rp 221.685.663.360
	Capaian IKU				10,58%	75,02%	30,01%		49,68%		86,09%
	2b-CP	P/M	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	MAX/TLK							
			Target/Realisasi	Rp 1.450.000.000	Rp 732.461.459	Rp 984.115.491	Rp 984.115.491	Rp 1.404.748.286	Rp 1.404.748.286	Rp 3.050.057.128	Rp 3.050.057.128
	Capaian IKU				50,51%	226,23%	67,87%		96,88%		210,35%
3 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal											
	3a-CP	P/L	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN	MAX/TLK							
			Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN	89,33%	0,00%	75,37%	75,37%		75,67%	96,58%	96,58%
	Capaian IKU				0,00%	75,37%	75,37%		75,67%		96,58%
	a	P/L	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	MAX/TLK							
			a. Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2023)	bobot 75%		88,13%	88,13%	81,41%	81,41%	77,14%	77,14%
			b. Optimalisasi Th sebelumnya	bobot 25%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	78,30%	78,30%
	Capaian				68%	91,10%	91,10%		86,06%		77,43%

b	P/L	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	MAX/TLK							
		Jumlah target/realisasi bidang tanah yang telah disertifikatkan (sesuai kriteria)	337		201	201	220	220,00	390	390,00
		Capaian	-		149,11%	59,64%		65,28%	115,73%	115,73%
3b-CP	P/M	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	MAX/TLK							
		Target/Realisasi	504	195	256	256,00	398	398	517	517
		Capaian IKU		38,69%	169,31%	50,79%		78,97%	102,58%	102,58%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional									
4a-CP	P/M	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	MIN/TLK							
		Target/Realisasi	25%	0%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0%	0,00%
		Capaian IKU		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
4b-CP	P/M	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	Max/AVG							
		Target/Realisasi	70	99,91	100,00	99,95	100,00	99,97	100,00	99,98
		Capaian IKU		99,91	100,00	99,95		99,97	100,00	99,98
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif									
5a-CP	P/M	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	MAX/TLK							
		Jumlah realisasi Frekuensi e-Auction		101	182	182	384	384	701	701
		Jumlah realisasi Frekuensi e-Conventional Auction	94%	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah realisasi Frekuensi pelaksanaan lelang		101	182	182	384	384	701	701
		Capaian realisasi e-Auction		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Capaian Realisasi e-Conventional Auction		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Capaian IKU		100%	100%	100%		100%	100%	100%
5b-CP	P/M	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang online	MAX/TLK							
		Jumlah Permohonan lelang online	86%	137	270	270	499	499	789	789
		Total Jumlah Permohonan lelang		137	276	276	505	505	795	795
		Capaian IKU		100%	98%	98%		98,81%	99,25%	99,25%
5c-CP	P/M	Persentase Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	MAX/TLK							
		Jumlah Aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya	102	20	60	60	84	84	102	102
		Jumlah Rekomendasi Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti satker	7	0	4	4	8	8	8	8
		Capaian	-	15,69%	58,49%	58,49%		88,74%	102,86%	102,86%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif									
6a-CP	P/L	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	MAX/TLK							
		Jumlah Tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2022 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN		31,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32	32,00
		Jumlah Tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2023 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN	86,00%	5,00	21,00	21,00	30,00	30,00	30	30,00
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2022		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33	33,00
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2023		25,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35	35,00
		Capaian IKU	-	62%	77,94%	77,94%		91,18%	91,18%	91,18%

7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif										
	7a-N	P/M	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	Max/AVG							
			Target/Realisasi	100	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	
	Capaian IKU				#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	#NA	
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal										
	8a-CP	P/M	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Max/TLK							
			Target/Realisasi	100	100,00%	100,00%	100,00%	100	100	107,76	107,76
	Capaian IKU				114,60%	114,60%	114,60%	120	120	120	120
	8b-N	P/M	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	Max/TLK							
			Target/Realisasi	100%						120,00%	120,00%
	Capaian IKU									120,00%	120,00%
	8d-CP	P/M	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	MIN/TLK							
		a. Deviasi Data PNPB Bea Lelang PL I	15%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		b. Deviasi Data PNPB Biad PPN	15%	1,97%	1,05%	1,05%	0,75%	0,75%	0,56%	0,56%	
Capaian IKU				0,99%	0,53%	1%		0,38%	0,28%	0,28%	
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif										
	9b-N	P/M	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	Max/TLK							
			Target/Realisasi	60						96,51	96,51
	Capaian IKU									96,51	96,51
10	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi										
	10a-N	P/M	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	MAX/TLK							
			Indeks Pengelolaan Kinerja Pegawai	80						96,01	96
			Indeks Pengelolaan Kinerja Organisasi	80						99,23	99
			Indeks Kualitas Manajemen Risiko	80						100	100
	Capaian IKU									98,57	98,57
	10b-N	P/M	Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP)	MAX/TLK							
			Jumlah bawahan yang memenuhi kriteria	100%	7	27,00	27	27,00	27	27,00	27
			Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria		6	27,00	27	27,00	27	27,00	27
			Jumlah bawahan total		28	28,00	28	27,00	27	27,00	27
		% Capaian Utama	25,00%		96,43%	96,43%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		% Capaian Tambahan	21,43%		96,43%	96,43%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Capaian IKU				29,29%	115,71%	115,71%		120,00%	120,00%	120,00%	

